

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sangat penting untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata material dan spiritual. Pembangunan ini berupa perbaikan taraf hidup manusia yang dapat menghasilkan berbagai keuntungan bagi masyarakat (*Kemenkeu 1995*). Namun, terkadang pembangunan yang dilakukan tidak merata, sehingga perlu diperhatikan ketersediaan fasilitas sosial yang memadai (*Hudiyanto, 2017*). Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (*Kemenkeu 1995*). Pembangunan ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk pemberdayaan Usaha Kecil, meningkatkan kesempatan dan kemampuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan.

Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan . Jumlah penduduk yang bertambah memerlukan berbagai fasilitas pelayanan, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, untuk mengoptimalkan potensi individu (*Tactfulness, 2018.*) Namun, pembangunan fasilitas pelayanan seringkali belum memadai di berbagai sektor, termasuk dalam bidang fasilitas pelayanan sosial. Kendala dalam bidang fasilitas sosial ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya ketersediaan fasilitas pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketidakcocokan pola perencanaan pembangunan, dan kurangnya kesiapan masyarakat atau pengelola

sumber daya alam. Hal ini menuntut pengelolaan yang lebih intensif agar dapat meningkatkan produktivitas yang optimal (Tarigan., 2020).

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan fasilitas sosial di masyarakat semakin meningkat. Fasilitas sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan infrastruktur umum menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, ketersediaan dan kualitas fasilitas sosial seringkali tidak mencukupi dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil seperti di desa pelosok (Moral, 2023) menunjukkan bahwa perpaduan antara teknologi digital berbasis internet dan partisipasi publik telah berperan sangat penting dalam merangsang perubahan di komunitas pedesaan di Indonesia.

Fasilitas sosial adalah prasarana yang menunjang kebutuhan dasar dan kehidupan sehari-hari di wilayah. Pembangunan Fasilitas sosial yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, serta tempat kerja dan pelayanan sosial mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan budaya (Priyadharma, 2004). Selain itu, lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta sebagai sarana untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar kelompok masyarakat. Fasilitas sosial dapat didefinisikan sebagai tempat atau sarana yang memfasilitasi dan mempermudah berbagai kegiatan masyarakat. Pembangunan fasilitas ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, dan umumnya didasarkan pada kebutuhan dan persepsi masyarakat setempat. Hal ini

penting karena memungkinkan penyesuaian fasilitas dengan kebutuhan dan keilmuan manusia di wilayah tersebut (*Mardiasmo, 2018*).

Dalam pembangunan wilayah, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1987, tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial, termuat definisi fasilitas sosial, yaitu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah dan pelayanan umum serta pemakaman umum. Sedangkan prasarana lingkungan meliputi jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan serta utilitas umum terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, gas, telepon, kebersihan/pembuangan sampah dan pemadam kebakaran (*grati 2014*). Dengan demikian, prasarana lingkungan yang terdiri dari jalan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, serta utilitas umum, memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan lebih aman dan nyaman.

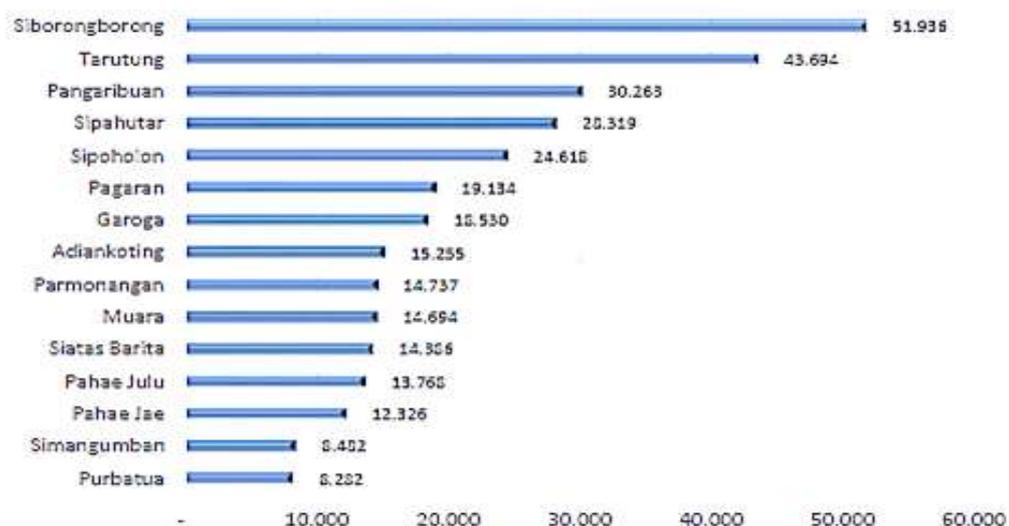
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan fasilitas sosial tidak hanya sekedar meminta masukan atau pendapat mereka, tetapi juga melibatkan mereka terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat terlibat dalam identifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengevaluasi rencana yang diajukan. (*Subekti 1945*) Dengan demikian, keterlibatan masyarakat memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi yang sesungguhnya dari masyarakat yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Kualitas dan kebutuhan dari perencanaan pembangunan fasilitas sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat

keterlibatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat, semakin baik pula hasil yang diinginkan dalam hal pemahaman atas kebutuhan lokal, penerimaan terhadap rencana pembangunan, dan pelaksanaan proyek secara efektif (*Sugeng. 2009 dalam Mamuju 2019*).

Penelitian ini menggambarkan kompleksitas ketidakmerataan distribusi infrastruktur sosial di Indonesia, yang merupakan tantangan sentral dalam pembangunan nasional. Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi yang terkena dampaknya, menghadapi tantangan signifikan terkait aksesibilitas dan kualitas fasilitas sosial. Di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, ditemukan masalah serius terkait kekurangan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial (*Wijaya 2023*) menyoroti bahwa ketimpangan ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan lokal tetapi juga menghambat potensi pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk Kecamatan Siborong Borong, perlu melakukan pengembangan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pengembangan infrastruktur perkotaan di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan dinamika pertumbuhan populasi. Peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, transportasi umum, sistem drainase, air bersih, dan listrik menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan. Selain itu, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat pelayanan publik juga menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (*Farhan 2023*).

Distribusi jumlah penduduk di suatu kabupaten, menyoroti area-area dengan kepadatan penduduk tertinggi. Tingginya jumlah penduduk dalam kawasan tertentu bisa menunjukkan tantangan seperti keterbatasan dalam akses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Analisis ini juga memberikan dasar untuk perencanaan pengembangan wilayah yang lebih baik, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak penduduk serta upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Gambar 1 Distribusi Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kecamatan, 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara 2023

Berdasarkan data yang disajikan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023, distribusi penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 menunjukkan variasi yang signifikan antar kecamatan. Dimana kecamatan Siborongborong memiliki jumlah penduduk yang tinggi yang berada di urutan pertama dengan nilai 51.955 jiwa. Analisis ini penting untuk memahami dinamika

demografis serta kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang berbeda di setiap kecamatan. Data ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif, dengan memperhatikan karakteristik penduduk di masing-masing wilayah.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023, distribusi penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 memperlihatkan jumlah yang beragam di berbagai kecamatan. Sebagai contoh, Kecamatan Siborongborong memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.488 jiwa, menjadikannya salah satu kecamatan dengan populasi terbesar. Sementara itu, kecamatan lain seperti Kecamatan Parmonangan memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah, yaitu sebanyak 12.876 jiwa. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam distribusi penduduk yang memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di setiap kecamatan.

Permasalahan yang timbul dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Siborongborong adalah peningkatan kebutuhan akan fasilitas sosial. Hal ini meliputi ketersediaan, kenyamanan, serta sarana dan prasarana yang mendukung fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pendidikan seperti sekolah. Di kecamatan ini, terdapat beberapa masalah, misalnya ketersediaan sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang lebih banyak terpusat di ibu kota kecamatan. Hal ini menyebabkan anak-anak di pedesaan atau pelosok desa

harus menempuh jarak jauh bahkan harus tinggal di tempat kos untuk melanjutkan pendidikan.

Fasilitas sosial di daerah pedesaan, khususnya di Kecamatan Siborongborong, sering kali tidak memadai dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek penting seperti infrastruktur, layanan publik, dan akses ke sumber daya. Misalnya, dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, seperti pengelolaan e-KTP, fasilitas di pedesaan sering menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur yang memadai untuk menangani volume pengajuan yang tinggi. Selain itu, akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain juga seringkali terbatas, membuat masyarakat pedesaan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Persepsi masyarakat mencerminkan kebutuhan yang tinggi akan peningkatan fasilitas tersebut untuk memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Masyarakat pedesaan memiliki harapan yang tinggi untuk memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas sosial yang memadai. Hal ini tercermin dalam keinginan mereka untuk memiliki infrastruktur yang lebih baik, layanan publik yang lebih efektif, dan akses yang lebih mudah ke sumber daya. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik dan lebih komprehensif.

Ketersediaan fasilitas sosial pendidikan yang memadai sangat penting bagi perkembangan sebuah wilayah. Pendidikan adalah sarana untuk memperoleh wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, yang pada gilirannya membuka

peluang kerja lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu kota, seharusnya hal ini diimbangi dengan pertumbuhan serta ketersediaan sekolah yang memadai agar para penduduknya dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan pra-penelitian pada bulan April 2024 dengan melakukan wawancara kepada 3 masyarakat. Peneliti mewawancarai masyarakat yang memenuhi kriteria tinggal dengan jarak yang dekat, sedang, dan jauh dari Ibukota kecamatan.

1. Masyarakat yang tinggal dengan jarak dekat dari Ibukota Kecamatan yaitu Kelurahan Siborongborong
2. Masyarakat yang tinggal dengan jarak sedang dari Ibukota Kecamatan yaitu Desa Pohan Tonga
3. Masyarakat yang tinggal dengan jarak jauh dari Ibukota Kecamatan yaitu Desa Pohan Jae

Adapun Hasil Pra wawancara sebagai Berikut :

1. Persepsi awal sarana dan prasarana sekolah di kecamatan Siborongborong

Responden :

Persepsi awal sarana dan prasarana sekolah di kecamatan Siborongborong menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di kota ini sudah cukup baik. Sekolah-sekolah berada di lokasi yang mudah diakses, dengan bangunan permanen dan

kondisi yang baik. Pelayanan yang diberikan juga nyaman dan baik. Namun, untuk sekolah menengah atas yang jaraknya lebih jauh, anak-anak dari desa sering memilih tinggal di kos-kosan dekat sekolah mereka di kota. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas ke sekolah menengah atas masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memudahkan akses bagi siswa dari desa.

2. Persepsi awal sarana dan prasarana Kesehatan di kecamatan Siborongborong

Responden :

Persepsi awal sarana dan prasarana kesehatan di kecamatan Siborongborong menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di kota ini sudah cukup baik. Namun, di desa, hanya terdapat bidan yang tidak tinggal di sana, sehingga jika ada kebutuhan akan perawatan kesehatan yang serius, mungkin diperlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai fasilitas kesehatan di kota. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan di desa masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

3. Persepsi awal kualitas pelayanan kesehatan di kecamatan Siborongborong

Responden :

Persepsi awal kualitas pelayanan kesehatan di kecamatan Siborongborong menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan di kota ini sudah cukup baik dan mudah diakses. Namun, di desa, fasilitas pelayanannya masih kurang, sehingga masyarakat desa masih mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang memadai.

4. Persepsi awal kualitas kelayakan tempat ibadah di kecamatan Siborongborong

Responden :

Persepsi awal kualitas kelayakan tempat ibadah di kecamatan Siborongborong menunjukkan bahwa tempat ibadah di kota ini memiliki kapasitas yang memadai bagi warga. Namun, untuk gereja, perlu ditingkatkan lagi pembangunan kenyamanan agar memenuhi kebutuhan warga dalam beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa kelayakan tempat ibadah di kota ini masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan beribadah bagi warga.

5. Persepsi awal keberadaan pelayanan sosial di kecamatan Siborongborong

Responden :

Persepsi awal keberadaan pelayanan sosial di kecamatan Siborongborong menunjukkan bahwa pelayanan sosial baik seperti panti asuhan dan panti jompo sangat penting bagi masyarakat karena memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yatim piatu, orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal, serta mereka yang membutuhkan perawatan khusus. Sarana serta prasarana yang ada pada pelayanan sosial di kota ini sudah cukup baik dan juga perlu di tingkatkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di kota ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas Sosial Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

B . Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas sosial di daerah pedesaan, khususnya di Kecamatan Siborongborong, sering kali tidak memadai dibandingkan dengan daerah perkotaan.
2. Persepsi masyarakat mencerminkan kebutuhan yang tinggi akan peningkatan fasilitas tersebut untuk memenuhi standar pelayanan yang diharapkan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas maka peneliti membatasi penelitian ini pada analisis ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara

D.Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Rasio ketersediaan fasilitas sosial di Kecamatan Siborongborong terhadap ketersediaan jumlah penduduk ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang fasilitas sosial di Kecamatan Siborongborong?

3. Bagaimana persebaran fasilitas sosial di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi Rasio ketersediaan fasilitas sosial di Kecamatan Siborongborong terhadap ketersediaan jumlah penduduk
2. Menganalisis persepsi masyarakat tentang fasilitas sosial di Kecamatan Siborongborong
3. Menganalisis persebaran fasilitas sosial di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

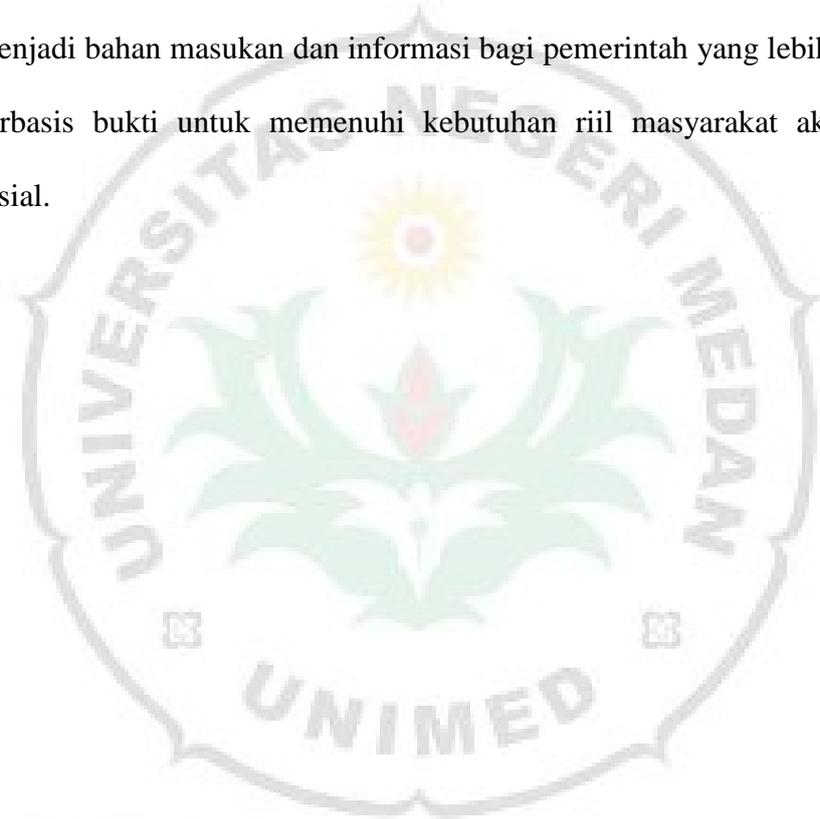
F. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

1. Memperluas pemahaman teoritis tentang keterkaitan antara persepsi masyarakat terhadap ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial.
2. Menjadi bahan kajian / referensi bagi peneliti selanjutnya, yang meneliti terkait dengan pengembangan fasilitas sosial berdasarkan persepsi masyarakat.

Manfaat Praktis:

1. Memberikan pandangan yang lebih jelas kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam perencanaan dan pengembangan fasilitas sosial di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah yang lebih akurat dan berbasis bukti untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat akan fasilitas sosial.



THE
Character Building
UNIVERSITY